

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2011**

**JUDUL PENELITIAN
PEMETAAN KOMPETENSI
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI PROVINSI BENGKULU**

**Ketua : Dr. Manap, M.Pd.
Anggota : Prof. Dr. Pudji Hartuti, M.Pd.
Dr. Puspa Djuwita, M.Pd.
Komarudin, S.Pd., M.Pd.
Muzanip Al-Farizi, S.Pd., M.Si.**



**DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor : 462/SP2H/PP/DP2M/VI/2011, Tanggal 11 Juni 2010**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN 2010**

BUNDAKARYA PEMERIKSAAN

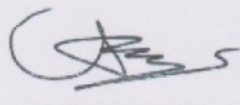
1. **Judul Penelitian** : **Penelitian Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMK) di Provinsi Bengkulu.**
2. **Ketua Penelitian**
 - a. Nama Lengkap : Dr. MANAP, M.Pd.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 19590520 198603 1 001
 - d. Jabatan Struktural : Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas/Jurusan : Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Ilmu Pendidikan
 - g. Pusat Penelitian : Universitas Bengkulu
 - h. Alamat : Jl. Raya Kandang Limun, Telp. (0736)21170, 342584
 - i. Telp/Faks : Faksimile (0736)342584, Kode Pos 38371.A
 - j. Alamat Rumah : Jln. Pepaya No. 97 Lingkar Timur, Kota Bengkulu
 - k. Telp./Faks/E-mail : 0736-27151/msomantri@yahoo.com.
3. **Lembaga Mitra** : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
4. **Anggota Peneliti**
 - 4.1 Dr. Pudji Hartuti, M.Pd. : Dosen FKIP Universitas Bengkulu
 - 4.2 Dr. Puspa Juwita, M.Pd. : Dosen FKIP Universitas Bengkulu
 - 4.3 Komarudin, S.Pd., M.Pd. : LPMP Bengkulu
 - 4.4 Muzanip Alperi, M.Si. : LPMP Bengkulu.
5. **Pembiayaan**

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Total Biaya yang Usulkan | Rp. 112.000.000,- |
| Biaya yang disetujui Dikti | Rp. 83.500.000,- |
| Biaya LPMP Bengkulu | Rp. 22.000.000,- |

Mengetahui,
Dekan FKIP UNIB

Prof. Saiful, M.A., Ph.D.
NIP. 19610121 1986 1 002

Bengkulu, 15 November 2010
Ketua Peneliti,


Dr. Manap, M.Pd.
NIP. 19590520 198603 1 001

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Bengkulu,

Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.
NIP. 19581112 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penatkan ke khadirat Allah Swt. Atas terselesaikannya laporan penelitian ini. Laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara kooperatif antara Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011.

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, yang mengambil sampel wilayah 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu, dengan peneliti terdiri dari 3 (tiga) orang Dosen Universitas Bengkulu (Dr. Manap, M.Pd., Prof.Dr. Puji Harturi, M.Pd., dan Dr. Puspa Djuwita, M.Pd.) serta 2 (orang) dari LPMP, yaitu (Komarudin, S.Pd., M.Pd. dan Muzanif Alferi, S.Pd., M.Si.).

Laporan ini berisi (I) Pendahuluan; (II) Kajian Pustaka; (III) Metode Penelitian; (IV) Hasil Penelitian dan Pembahasan; (V) Simpulan dan Rekomendasi. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak atas terselesaikannya laporan ini dihaturkan banyak terima kasih.

Demikian laporan ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan pemeriksaan dan tindak lanjut bagi kegiatan lain yang relevan.

Bengkulu, Juni 2010
Penulis/Peneliti
Dr. Manap, M.Pd., dkk.

I. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Bengkulu

2. Ketua Peneliti

(a) Nama Lengkap : Dr. Manap, M.Pd.

(b) Bidang Keahlian : Manajemen Pendidikan

3. Anggota peneliti dari perguruan tinggi

| No | Nama dan Gelar | Keahlian | Jurusan/Fakultas/P T | Curahan Waktu (Jam) |
|----|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Dr. Manap, M.Pd. | Manajemen Pendidikan | JIP/KIP/UNIB | 300 Jam |
| 2. | Dr. Pudji Hartuti, M.Pd. | Psikologi Pendidikan | JIP/KIP/UNIB | 250 Jam |
| 3. | Dr. Puspa Juwita, M.Pd | Pendidikan Nilai | JIP/KIP/UNIB | 250 Jam |

4. Anggota peneliti dari lembaga mitra (LPMP Bengkulu)

| No | Nama dan Gelar | Keahlian | Institusi | Curahan Waktu (Jam/Minggu) |
|----|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| 1. | Komarudin, S.Pd., M.Pd. | Manajemen Pendidikan | LPMP Bengkulu | 250 Jam |
| 2. | Muzanip Alperi, S.Pd. M.Si. | Teknologi Pendidikan | LPMP Bengkulu | 250 Jam |

5. Objek penelitian : Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama

6. Lokasi penelitian : 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

7. Hasil yang ditargetkan : 1. Laporan Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah
2. Instrumen Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah
3. Pedoman Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah
4. Peta Kompetensi Kepala Sekolah
5. Artikel Ilmiah Tentang Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah

8. Insitusi lain yang terlibat : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu.

9. Sumber biaya Dikti : Rp. 85.300.000,-

10. Sumber Biaya selain Dikti : Rp. 12.000.000,-

11. Keterangan lain : Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis terdahulu tentang hasil analisis kebutuhan diklat calon kepala sekolah.

II. SUBSTANSI PENELITIAN

ABSTRAK

Pemetaan kompetensi kepala sekolah dalam jangka panjang bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan penguasaan kompetensi kepala sekolah secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kompetensi aktual yang telah dikuasai oleh kepala sekolah serta kompetensi yang belum dikuasainya. Peta kompetensi dapat dijadikan dasar untuk merencanakan perbaikan sistem dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah; pembinaan dan peningkatan kompetensi kepala sekolah; menyiapkan silabus dan bahan yang diperlukan untuk mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah.

Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan jalan (1) mendeskripsikan kriteria, syarat, dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah; (2) mengembangkan instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah; (3) mengembangkan teknik penskoran dan perhitungannya; (4) pengumpulan data dan mengolah hasilnya menjadi peta kompetensi kepala sekolah; (5) menyusun rekomendasi perbaikan sistem dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah serta rekomendasai rencana diklat dan cakupan materi diklat peningkatan kompetensi kepala sekolah.

Target khusus (luaran) yang ingin dihasilkan antara lain: (1) deskripsi kriteria, syarat, dan mekanisme pengangkatan, mutasi, dan pembinaan kepala sekolah; (2) tersusunnya instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah; (3) panduan pemetaan kompetensi kepala sekolah; (4) peta penguasaan kompetensi kepala sekolah baik secara individu maupun kolektif; (5) rekomendasi perbaikan sistem dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah, serta rekomendasi rencana diklat dan cakupan materi diklat peningkatan kompetensi kepala sekolah.

KATA KUNCI

Pemetaan Kompetensi; Kepala Sekolah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan terus meningkat, antara lain tampak dari meningkatnya anggaran pendidikan. Meningkatnya perhatian dan anggaran pendidikan antara lain bertujuan untuk menangani permasalahan pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan, peningkatan mutu proses dan luaran pendidikan, sehingga visi *Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif* dapat terwujud.

Pada Permendiknas Nomor 13 Tahun 2009 ditegaskan bahwa “kepala sekolah harus memenuhi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus”. Selain itu, kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi, yang terdiri dari (1) kompetensi kepribadian; (2) kompetensi manajerial; (3) kompetensi kewirausahaan; (4) kompetensi supervisi; dan (5) kompetensi sosial. Semakin baik penguasaan kelima kompetensi kepala sekolah tersebut, akan semakin baik pula kinerja kepala sekolah.

Pasca terbitnya Permendiknas Nomor 13 Tahun 2009 telah diupayakan adanya beberapa kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah, antara lain berupa pemberian block-grant pembinaan kelompok/musyawarah kerja kepala sekolah, pelatihan calon pelatih fasilitator pemberdayaan kelompok/musyawarah kerja kepala sekolah, kemitraan kepala sekolah antara sekolah-sekolah yang tergolong maju dengan sekolah yang belum maju, dan beberapa kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara parsial, kurang serius, dan kurang bermakna bagi peningkatan kompetensi kepala sekolah. Peningkatan kompetensi yang diharapkan seringkali tidak dapat diukur karena terdapat ketidakjelasan dalam merumuskan tujuan, dan tidak berdasarkan hasil analisis kebutuhan nyata. Sosialisasi, pelatihan, workshop dan seminar hanya ditunaikan tetapi pesertanya tidak memperoleh hasil yang memuaskan.

Program peningkatan mutu manajemen sekolah akan mempunyai dampak ganda terhadap peningkatan berbagai aspek dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu, penguasaan kompetensi kepala sekolah amat menentukan keberhasilan suatu satuan pendidikan. Sejak diterbitkannya Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah hingga akhir tahun 2009, LPMP Bengkulu belum memiliki instrumen dan panduan baku yang digunakan untuk menyeleksi calon kepala sekolah ataupun mengukur kadar kompetensi kepala sekolah. Setiap daerah (Kabupaten/Kota) mempunyai kebijakan dan kriteria tersendiri untuk mengangkat, memutasikan, ataupun memberhentikan kepala sekolah. Kadang kriteria umum dan persyaratan yang diberlakukan secara nasional tidak lagi dijadikan acuan di daerah dalam pengangkatan kepala sekolah. umum dan persyaratan khusus, juga belum memiliki instrumen untuk mengukur penguasaan kompetensi kepala sekolah, sehingga diketahui adanya kepala sekolah yang kompeten dan kepala sekolah yang kurang kompeten. Padahal, hasil

pemetaan penguasaan kompetensi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kompetensi dan kinerja kepala sekolah.

Penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah turut memberikan “warna” dalam seleksi, pengangkatan, penugasan, dan pemberhentian kepala sekolah, dimana unsur politis dan KKN lebih nyata perannya dibandingkan dengan penilaian prestatif, sistem karir, dan profesionalisme. Kondisi ini sangat bertentangan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, dalam jangka panjang akan sangat memperburuk mutu pendidikan di Bengkulu. Hal ini menambah urgensi perlu adanya instrumen untuk menguji kesiapan calon kepala sekolah, dan memetakan kompetensi kepala sekolah, guna pelaksanaan pembinaan yang lebih berhasil.

B. Rasional dan Rumusan Masalah

Penguasaan kompetensi kepala sekolah sangat penting untuk dipetakan dalam rangka pembinaan dan penyusunan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan. Rendahnya mutu pendidikan di Bengkulu utamanya patut diduga disebabkan oleh lemahnya kompetensi kepala sekolah, dan lemahnya layanan pembinaan terhadap mereka. Sampai saat ini, belum ada data tentang profil kompetensi kepala sekolah, baik secara individu, kabupaten/kota ataupun provinsi Bengkulu. Ketepatan penyediaan data tersebut sangat diperlukan untuk memfasilitasi kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas dan kompetensinya agar sesuai dengan kriteria standar nasional pendidikan atau melebihinya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan rasional di atas dipandang perlu untuk mengadakan pemetaan kompetensi kepala sekolah. Secara umum dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. “Bagaimanakah kompetensi kepala sekolah pada level kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu”. Secara khusus penelitian ini akan mengkaji permasalahan: (1) Bagaimana kriteria, persyaratan, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, mutasi, pembinaan, dan pemberhentian kepala sekolah di masing-masing kabupaten/kota; (2) Bagaimanakah instrumen yang tepat untuk pemetaan kompetensi kepala sekolah; (3) Bagaimanakah panduan pengolahan data pemetaan kompetensi kepala sekolah; (4) Bagaimanakah peta kompetensi kepala sekolah; (5) Bagaimanakah rumusan rekomendasi yang dapat diusulkan guna penyempurnaan kriteria, persyaratan, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, mutasi, pembinaan, dan pemberhentian kepala sekolah.

C. Rekam Jejak Penelitian Lembaga Yang Bekerjasama

Lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) yang sebelumnya bernama Balai Pelatihan/ Penataran Guru (BPG) merupakan unit pelaksana teknis dari Departemen Pendidikan Nasional yang ada di provinsi. BPG mempunyai kegiatan utama menyelenggarakan pelatihan terkait dengan upaya pembaharuan pendidikan, serta diseminasi dan implementasi kebijakan pendidikan. Peran tersebut berubah manakala nama dan orientasinya berubah, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa “Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di Provinsi dan bertugas

untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non-formal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan”. Terkait dengan penjaminan peningkatan mutu pendidikan, LPMP memiliki program pemberian bantuan pembinaan yang relevan seperti *block-grant* KKG/MGMP, KKKS/ MKKS, KKPS/MKPS, serta program kemitraan antara sekolah yang maju (telah memenuhi standar nasional) dengan sekolah-sekolah yang kurang maju (potensi), tetapi belum ada penelitian tentang efektivitas program tersebut bagi peningkatan mutu pendidikan. Penelitian dan pengembangan tidak termasuk tugas utama LPMP, tetapi kegiatan tersebut akan sangat membantu ketika para widyaiswara dan staf LPMP juga melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait dengan bidang tugasnya. Penelitian kemitraan antara dosen LPTK dengan staf LPMP atau widyaiswara akan sangat membantu tumbuhnya kemampuan dalam melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan.

Pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) di Provinsi Bengkulu, khususnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, telah ada beberapa judul penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yang dikembangkan oleh Dosen Jurusan Ilmu Pendidikan, diantaranya telah dilakukan penelitian tentang: (1) analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan profesi kepala sekolah; (2) pemetaan kebutuhan guru berdasarkan rombongan belajar, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi guru SMP di Kota Bengkulu; (3) pemetaan masalah dan potensi pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Bengkulu; (4) analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah; serta (5) analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung kinerja LPMP, khususnya dalam melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan di sekolah/wilayah binaan antara lain dapat dilakukan penelitian kemitraan tentang pemetaan kompetensi kepala sekolah.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian pemetaan kompetensi kepala sekolah secara umum bertujuan untuk menggambarkan kompetensi yang telah dikuasai oleh kepala sekolah serta kompetensi yang belum dikuasainya. Peta kompetensi tersebut dapat dijadikan dasar untuk merencanakan perbaikan sistem dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah; pembinaan dan peningkatan kompetensi kepala sekolah; menyiapkan silabus dan bahan yang diperlukan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kriteria, persyaratan, diklat, pengangkatan, mutasi, pembinaan, dan pemberhentian kepala sekolah; (2) mengembangkan instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah; (3) menyusun panduan pemetaan kompetensi kepala sekolah; (4) menyajikan profil kompetensi kepala sekolah baik secara individu maupun kolektif; (5) merumuskan rekomendasi perbaikan kriteria, persyaratan, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, mutasi, pembinaan, dan pemberhentian kepala sekolah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil pemetaan kompetensi kepala sekolah secara umum bermanfaat untuk menggambarkan penguasaan kompetensi kepala sekolah, sehingga dapat diketahui kepala sekolah yang kompeten, dan kepala sekolah yang kurang kompeten. Peta kompetensi tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan fasilitasi dalam upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah. Secara khusus penelitian ini bermanfaat dalam menghasilkan: (1) deskripsi kriteria, persyaratan, diklat, pengangkatan, mutasi, pembinaan, dan pemberhentian kepala sekolah; (2) instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah; (3) panduan pemetaan kompetensi kepala sekolah; (4) peta penguasaan kompetensi kepala sekolah baik secara individu maupun kelompok; (5) rekomendasi perbaikan kriteria, persyaratan, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, mutasi, pembinaan, dan pemberhentian kepala sekolah.

F. Urgensi Penelitian

Penelitian pemetaan kompetensi kepala sekolah khususnya pada jenjang SMP dipandang penting, disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa: **Pertama**, pelaksanaan **otonomi daerah** dan **desentralisasi pendidikan** belum berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan awalnya, dimana berbagai keputusan dan kegiatan satuan pendidikan dapat dijalankan secara lebih otonom dan profesional, pada kenyataannya pengelolaan pendidikan menjadi semakin birokratis dan kurang profesional. Hal tersebut nampak dari proses pengangkatan kepala sekolah yang kurang objektif, kurang transparan, tidak mempedomani peraturan dan ketentuan yang ada, kurang memperhatikan prestasi kerja dan kaidah-kaidah sistem merit.

Kedua, konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dijadikan acuan dalam pengelolaan sekolah yang lebih mandiri dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Sisdiknas, di banyak sekolah belum dapat diimplementasikan secara benar, bahkan cenderung sebaliknya. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh rekrutmen kepala sekolah yang kurang transparan, kurang objektif, dan belum berlandaskan pada regulasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Akibatnya, banyak kepala sekolah yang tidak mandiri, bergantung, tidak kreatif, kaku, “penakut”, kurang profesional, bersikap ABS (asal bos senang), menunggu perintah, serta menunggu juklak dan juknis.

Ketiga, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah belum pernah disusun instrumen uji kompetensi bagi calon kepala sekolah ataupun bagi kepala sekolah yang sudah menduduki jabatan. Keberadaan dan penggunaan instrumen tersebut dipandang perlu sebagai untuk menentukan kelayakan calon kepala sekolah, dan sebagai peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam jabatan secara berkelanjutan.

Keempat, sertifikasi guru sebagai salah satu upaya untuk peningkatan

profesionalisme jabatan guru dan tenaga kependidikan serta peningkatan kesejahteraannya, cenderung berorientasi untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraannya tetapi belum banyak mengubah budaya profesionalnya. Budaya profesional seperti berkompetisi untuk mencapai prestasi terbaik, dan peningkatan kemampuan secara berkelanjutan belum banyak dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Kelima; guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan birokrat penyelenggara pendidikan yang seharusnya memerankan diri sebagai mitra dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan seringkali bertindak selaku atasan. Jabatan guru, kepala sekolah, pengawas, dan birokrat pendidikan mestinya dipandang sebagai alternatif karir profesi guru, yang persaratan mutasinya ke jenjang profesi yang memerlukan persyaratan yang lebih kompleks memerlukan rekam jejak keberhasilan dari posisi yang menjadi prasaratnya. Misalnya: guru yang berhasil dan berprestasi mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi kepala sekolah; Kepala sekolah yang berhasil dan berprestasi mempunyai peluang yang lebih besar untuk menduduki posisi sebagai pengawas sekolah; dan mereka yang berhasil melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik pada posisi tersebut mestinya mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi birokrat di lingkungan dinas pendidikan. Siatem karir seperti itu akan membawa keberhasilan yang lebih dalam penyelenggaraan pendidikan.

Keenam; Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan, dan Sekolah-sekolah seringkali berada dalam posisi yang berbeda, dan seolah mempunyai kepentingan yang berbeda, pada kehadiran masing-masing pihak mestinya dapat saling melengkapi dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan yang dapat memenuhi keperluan masyarakat secara merata dan bermutu. Setiap pihak dapat memberikan kontribusi dan sinergi yang positif dalam peningkatan mutu dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan di suatu wilayah.

G. Luaran Penelitian

Program hibah penelitian kerjasama antara Universitas Bengkulu dengan LPMP Bengkulu akan menghasilkan modal ilmiah dan karya yang bermanfaat bagi peningkatan profesionalisme kepala sekolah dan pemecahan masalah kelembagaan pendidikan khususnya di Provinsi Bengkulu, antara lain berupa:

- 1) Laporan Penelitian Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah.
- 2) Instrumen Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah.
- 3) Panduan pemetaan dan instrumen pemetaan kompetensi kepala sekolah sebagai dasar penilaian kelayakan calon kepala sekolah dan sebagai dasar bagi upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah.
- 4) Profil Kompetensi Kepala Sekolah Secara Individu per Kabupaten/Kota, dan
- 5) Publikasi artikel ilmiah pada jurnal tingkat nasional tentang pemetaan kompetensi kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas (2006). *Petunjuk Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen*. Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pembinaan SMP, Depdiknas, Jakarta.
- Badan Standar Nasional Pendidikan (2006). *Naskah akademik tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Bossert (2002). *Becoming a Good Principal: The Forst Years*. Paper Presented at the Annual Meeting of the Midsouth Educational Research Association, Litle Rock AS.
- Cohen (1982). *The Principal and Staff Development in the S Cohen, 1982 High School*. New York: Bank Street College in Education.
- Crow & Paterson, (1998). *Improving School Public Relation Through Principal Leadership*. New York: Allyn and Bacon.
- Fullan, MG (2000). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College, Colombia University.
- Imergart, Glen (1988). *Leadership and Leader Behavior, in Handbook of Research Educational Administration*. London: Longman
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah.
- Leithwood dan Montgomery's (1998). *The Principal First Years: The Mutual Process of Developing Leadership. Educational Leadership*, 6 (6) 32-49.
- Manap, (2008), Analisis Kebutuhan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, Laporan Penelitian, Program Magisten Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu.
- Manap dan Puspa Juwita (2009), Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Bengkulu, Laporan Penelitian, Program Magisten Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu.
- Manap, Sarwit, dan Boko Susilo, (2009), Pemetaan Potensi dan Masalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Bengkulu, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian, Universitas Bengkulu.
- Mulyasa (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Oteng Sutisna (1996). *Administrasi Pendidikan. Petunjuk Poraktis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Pasaribu, Rugun (1986). *Perilaku Supervisi Instruksional Kepala Sekolah dan Kontribusinya terhadap Penampilan Mengajar Guru pada STM Kota Madya dan Kabupaten Bandung*. Bandung: Fakultas Pascasarjana, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung.
- Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan.
- Rosenholtz, S.J. (1988). *Efective Schools: Interpreting the Evidence' American Journal of Education* 93 (3) 42 – 64.
- Root Love (1998). *High School: A Report on Secondary Education in America*. New York: Harper & Row, Publication.